

BAB IV

UPAYA-UPAYA YANG DILAKUKAN KURDISTAN REGIONAL GOVERNMENT (KRG)

Pada Bab ini penulis menjelaskan mengenai bagaimana upaya-upaya yang telah dilakukan Kurdistan Regional Government untuk mendapatkan pengakuan internasional dalam mendirikan negara berdaulat, baik itu melalui jalur pemerintah yang dilakukan melalui diplomasi dengan menyelenggarakan pertemuan maupun melalui jalur bisnis yang dilakukan dengan cara menjalin kerjasama perdagangan.

Sebagai mana yang kita ketahui bahwa setiap orang memiliki hak untuk secara bebas menentukan kemauannya sendiri, khususnya dalam hal prinsip mengenai kebebasan berpolitik dan kebebasan dalam bidang ekonomi, social dan budaya. Adanya kepentingan yang berbeda serta adanya kebebasan memilih menyebabkan banyak orang lebih memilih cara sendiri dalam menentukan pilihan. Namun berbeda dengan suatu bangsa yang ingin menentukan nasib sendiri dengan mendirikan negara. Untuk mendirikan sebuah negara ada banyak persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam penyelesaian perselisihan yang menyangkut bagian wilayah dari suatu negara juga selalu diusul untuk diselesaikan dengan memperhatikan azas hak untuk menentukan nasib sendiri (Suraputra, 2017).

Dengan mendirikan sebuah negara, secara tidak langsung negara tersebut akan menjadi subjek hukum internasional. Seperti yang telah diatur dalam ketentuan Konvensi Montevideo tahun 1993 tentang hak-hak dan kewajiban suatu negara, yang dimana terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi jika ingin mendirikan suatu negara. Seperti, adanya penduduk yang tetap, wilayah, pemerintahan atau penguasa yang berdaulat, dan kemampuan menjalin hubungan dengan negara lain (Adolf, 2003). 4 (empat) unsur tersebut merupakan persyaratan terbentuknya suatu negara

secara hukum internasional, kemudian ada unsur politik yang juga harus dipenuhi untuk menjadi negara yang berdaulat, yaitu memerlukan pengakuan (*recognition*) dari negara lain (Aust, 2005). Mendapatkan pengakuan dari negara lain termasuk persoalan yang cukup rumit karena melibatkan hukum dan politik internasional. Sehingga, jika persyaratan tersebut belum dipenuhi maka patutlah berbagai usaha dan upaya dilakukan. Dalam konteks ini, sama halnya dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh Kurdistan Regional Government Irak untuk mendapatkan pengakuan internasional dalam mendirikan negara berdaulat.

A. Upaya Melalui Jalur Pemerintah

Meskipun hubungan antara KRG dengan Turki dulunya bukanlah merupakan hubungan yang baik antara dua entitas tersebut. Akan tetapi, setelah diberlakukannya *no fly-zone* dan munculnya dukungan Presiden Turki Turgut Ozal terhadap terbentuknya “safe heaven” pada bulan April 1991 bagi etnis Kurdi merupakan langkah awal terciptanya hubungan baik antar kedua negara. Hal ini ditandai dengan persetujuan Presiden Turki pada tanggal 18 Januari 1991 yang memperbolehkan Amerika Serikat menyerang Saddam Hussein dari wilayah udara Turki dan penyebaran 100.000 pasukan Turki di sepanjang perbatasan Irak-Turki. Peristiwa ini menandakan kerjasama antar kedua negara yang saling membutuhkan mulai tercipta (Larrabee, 2007).

Disamping penyebaran pasukan di perbatasan, Turki kemudian menutup aliran pipa minyak yang menghubungkan ekspor minyak di Kirkuk, Irak dengan Yumurtalik, Turki pada tahun 1990, serta embargo perdagangan yang dilakukan Turki terhadap Irak. Hal ini dilakukan bukan karena Turki melihat KRG sebagai entitas negara, namun dalam kebijakan Turki tersebut hanya melihat KRG sebagai sekumpulan kelompok berbangsa Kurdi yang tinggal di Irak. Fokus utama yang diambil Turki pada perang teluk 1991 pada hakikatnya untuk

menghentikan pengungsi dari Irak Utara yang memasuki wilayah Turki dan mencegah terbentuknya negara Kurdi yang merdeka serta mengamankan perbatasan dari para teroris (Jamilah, 2018).

Bantuan-bantuan yang diberikan kepada KRG di atas merupakan strategi Turki untuk mencari jalan keluar bagi permasalahan yang ada dalam internal Turki sendiri terkait bangsa Kurdinya. Bahkan Presiden Ozal pada saat itu menyediakan paspor diplomatik untuk pimpinan KRG Masoud Barzani dan Jalal Talabani, yang dimana tindakan tersebut berhasil menciptakan kesepakatan damai antara pemerintah Turki dengan pemimpin PKK (Partai Buruh Kurdi) Abdullah Ocelan di Turki tahun 1993. Akan tetapi, pasca kematian Presiden Turgut Ozal, pemerintahan Turki pada masa perdana menteri Tansu Ciller lebih memilih pendekatan secara militaristik terhadap permasalahan Kurdi. Operasi unit special dilancarkan dan terjadinya beberapa pembunuhan, sehingga berdampak terhadap pengingkaran identitas etnik Kurdi dan semakin memperburuk konflik Kurdi di Turki.

Pasca kemenangan partai AKP (Partai Keadilan dan Pembangunan) tahun 2007 di Turki, pemerintah mengeluarkan kebijakan *Kurdish Opening* yang dibuat untuk menjamin adanya hak individu dan kolektif bagi bangsa Kurdi. Kemudian partai AKP melakukan negosiasi kembali dengan PKK untuk meningkatkan perundingan dengan KRG di Irak. Terkait hal ini, membaiknya hubungan Turki dengan bangsa Kurdi juga berdampak baik terhadap dinamika hubungan antara Turki dan KRG. Hubungan Turki-KRG membaik setelah kemenangan AKP terbukti dengan disepakatinya kerjasama tahun 2008 dalam bidang perdagangan, energi dan keamanan (Jamilah, 2018).

Setelah hubungan antara KRG-Turki membaik kemudian terjalannya berbagai kerjasama, muncul upaya yang dilakukan Kurdistan Regional Government (KRG) dalam

memperoleh pengakuan internasional melalui jalur pemerintah dilakukan dengan cara berdiplomasi dengan menyelenggarakan pertemuan dengan pemerintah Turki. Berikut upayah-upayah diplomatik yang dilakukan KRG terhadap Pemerintah Turki dalam rangka membangun hubungan diplomatik. *Pertama*, Pada bulan Mei 2012, Presiden KRG Masoud Barzani dan PM KRG Nechirvan Barzani menghadiri undangan Ankara. Kali ini pihak KRG mengisyaratkan kerjasama dalam isu-isu terkait ekonomi dan terorisme. Sehingga pertemuan tersebut menghasilkan kontrak transfer minyak dari KRG ke Turki tanpa adanya pertimbangan dari otoritas pemerintah Irak. Menurut data statistic 2011, Irak merupakan tujuan ekspor terbesar kedua Turki, dan diperkirakan setidaknya 50% perdagangan ini mengalir ke Irak Utara. Kemudian pada periode kedua tahun 2012 dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2011, data menunjukkan peningkatan sebesar 37% ekspor Turki ke Irak dan impor dari Irak sebesar 13%. Pada periode yang sama sehubungan dengan 2011, Irak mengalami kenaikan pangsa. Sehingga total ekspor Irak ke Turki sebesar 20% dan Turki ke Irak sebesar 58% (Lindenstrauss & Aksoy, 2012).

Sebelumnya, pada akhir April 2012 dalam kunjungan Menteri Perdagangan dan Industri KRG Sinan Celebi ke Turki, Sinan Celebi menunjukkan bahwa 25 perusahaan Turki baru akan diluncurkan di Kurdistan Irak setiap bulan, kemudian dia menekankan pada perusahaan sektor konstruksi dan perbankan. Pada konferensi energi tanggal 20 Mei 2012 di Erbil. Menteri Energi Turki, Taner Yildiz dan Menteri Sumber Daya Alam KRG Ashti Hawrami menandatangani perjanjian dalam bidang energi. Perjanjian ini dilakukan tanpa sepengetahuan pemerintah pusat Irak dan menghasilkan kesepakatan bahwa minyak dan gas Kurdistan akan langsung dikirim ke Turki. Menteri Ashti Hawrami menjelaskan bahwa ini dilakukan untuk menambah jaringan pipa baru sehingga dapat menyalurkan satu juta barel minyak ke kilang dan pelabuhan Turki. Namun ada keraguan mengenai kelayakan

proyek tersebut karena PKK menunjukkan sikap kebencian terhadap jaringan pipa Kirkuk-Yumurtalik pada akhir Agustus 2012 (Lindenstrauss & Aksoy, 2012).

Kedua, Pada tanggal 16 November 2013, Presiden Turki Recep Tayip Erdogan menyelenggarakan pertemuan dengan Presiden KRG Massoud Barzani di kota Diyarbakir, Kurdi. Pertemuan ini menjadi sorotan bagi media nasional maupun internasional, di samping itu terdapat pernyataan yang sangat menyorot perhatian dari Presiden Barzani, diterjemahkan dalam bahasa Turki: *“Long live Turk-Kurd brotherhood, long live freedom, and long live piece”* (Uras, 2013).

Dalam pertemuan kedua belah pihak tersebut, tidak hanya dihadiri oleh kedua pemimpin, pertemuan tersebut disaksikan puluhan ribu orang Kurdi yang didampingi oleh pemimpin Kurdi Masoud Barzani di Diyarbakir yang merupakan jantung wilayah Kurdi. Pertemuan ini dianggap sebagai pertemuan “bersejarah” oleh Erdogan karena dilakukan untuk memulai kembali perdamaian antara Kurdi dan Turki yang sempat lumpuh. *“Proses perdamaian akan maju dengan dukungan dari saudara-saudara saya di Diyarbakir,”* ujar Presiden Erdogan di hadapan warga Kurdi. *“Bagaimana Turki dan Kurdi bisa saling terpisah? Turki dan Kurdi seharusnya tidak lagi saling terpisah,”* lanjutnya. Dalam pertemuan tersebut Erdogan menyerukan untuk mengakhiri konflik yang menyebabkan 45 ribu orang tewas, sementara Barzani berharap pertemuan ini bisa membawa mereka kembali ke meja perundingan (Wardhana, 2013).

Ketiga, Pada minggu 26 Februari 2017, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bertemu dengan pemimpin KRG Massoud Barzani di Istana Mabeyn, Istanbul. Pertemuan tertutup ini berlangsung selama satu jam dengan topik utama yang dibahas adalah terkait hubungan ekonomi dan menyelamatkan Mosul dari kelompok terror ISIS. *“Irak penting bagi kita dalam segala hal, baik secara ekonomi,*

dalam hal keamanan perbatasan dan dalam hal kemanusiaan dan budaya," ujar juru bicara Erdogan setelah pertemuan berlangsung. Menyangkut hal ini, Ankara akan berperan aktif dalam melawan ISIS di Irak maupun Suriah (TRT.net, 2017). Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan pasukan militer Turki yang dibantu Tentara Pembebasan Suriah masuk ke Markas ISIS dan merebut kontrol Al-Bab dari ISIS pada tanggal 11 Februari 2017 (Suara, 2017).

B. Upaya Melalui Jalur Bisnis

Kemudian upaya yang dilakukan untuk mendapatkan pengakuan yang selanjutnya yaitu dengan jalur bisnis atau perwujudan perdamaian melalui perdagangan. Sebelum terjadinya Musim Semi Arab, kegiatan ekonomi Turki berada di beberapa bagian lain Irak. Turkish Petroleum Corporation (TPOA) aktif di sektor energy dan sektor konstruksi melalui perusahaan swasta di Irak selatan, serta bahkan berada di daerah Syiah yang sangat sensitif seperti Kota Sadr. Namun, ketika terjadinya Musim Semi Arab. Perdana Menteri Irak Nouri al-Malik dalam pidatonya pada bulan April 2012 menyebutkan Turki sebagai negara yang bermusuhan dan mengkritik kebijakan Turki yang berurusan dengan Syiah. Akibatnya, Turki harus mengarahkan aktivitas ekonominya ke wilayah lain yaitu Irak utara atau wilayah Kurdistan Irak. Dalam hal ini, persaingan Sunni-Syiah yang intensif merupakan alasan utama berpindahnya arah aktivitas ekonomi Turki. meskipun hubungan ekonomi Turki dengan KRG sudah ada sejak jauh sebelum Musim Semi Arab, akan tetapi Turki kembali memperkuat kerjasama yang lebih komprehensif dengan KRG (Lindenstrauss & Aksoy, 2012).

Dalam hal upaya, KRG melakukan kegiatan bisnis dan perdagangan dengan negara tetangganya Turki. Dalam hal bisnis dan perdagangan, kerjasama antara KRG dengan Turki sudah dijalin sejak tahun 2000-an. Dalam prakteknya Turki tidak membiarkan KRG dipisahkan dari pemerintah Irak.

Namun, Turki membuat KRG mendapatkan kemandirian terhadap perekonomiannya dengan mendirikan rute ekspor minyak. Seperti, masuknya dua perusahaan non-pemerintah Turki, Genel Energy dan Petoil yang telah ada di wilayah tersebut sejak awal tahun 2000-an. Genel Energy merupakan perusahaan pertama yang berinvestasi di Wilayah Kurdi. Mereka mulai bekerja di Wilayah Kurdistan dengan menandatangani PSC untuk bidang Taq Taq pada tahun 2002. Diikuti oleh Petoil yang memasuki wilayah tersebut pada tahun 2003. Dalam hal ini, Production Sharing Contract (PSC) yang dimaksud merupakan sistem untuk membuat kontrak antara Perusahaan Minyak Internasional (International Oil Companies /IOC) dengan KRG (Akyener & Kayael).

Pada tahun 2008, Irak dan Turki sepakat menjalin kerjasama dalam beberapa bidang termasuk perdagangan, energy dan keamanan. Total hasil perdagangan antara Turki dan Irak sebesar \$11.95 milyar. Dari jumlah perdagangan tersebut, sekitar \$7 milyar merupakan hasil dari perdagangan Turki dengan KRG. Dengan melihat perbedaan jumlah total perdagangan diatas menandakan bahwa hubungan kerjasama antara KRG-Turki lebih besar dibandingkan dengan Irak (Jamilah, 2018).

Pada tahun 2012, kembali KRG dan Turki menandatangani kesepakatan untuk membangun sebuah pipa gas dan dua pipa minyak yang menghubungkan langsung KRG (Irak utara) dengan Turki. Dengan dilaksanakannya pembangunan pipa gas ini maka akan memberikan otoritas secara langsung bagi KRG untuk mengelola perekonomiannya, dikarenakan proses pengiriman secara langsung minyak dan gas dari KRG ke Turki tanpa perlu meminta persetujuan pemerintah Irak (Jamilah, 2018).

Perusahaan Energi Turki yang merupakan perusahaan milik negara juga membeli beberapa lisensi tahun 2012 dan 2013. sehingga Perusahaan Energi Turki (*Turkish Energy*

Company /TEC) memiliki 13 kontrak sedangkan Genel Energy memiliki 7 kontrak, dan Petrol memiliki satu kontrak kemitraan di Wilayah Kurdi. Pada tahun 2013, Perusahaan Energi Turki menandatangani 7 PSC yang bertujuan untuk mengkonsolidasikan hubungan baik antara Turki dan KRG. Dari ketujuh kontrak tersebut, enam diantaranya dimiliki Exxonmobile. Terjalannya kerjasama Turki-KRG dalam industry minyak dan gas di atas, bertujuan untuk meningkatkan kemitraan antara kedua wilayah (Akyener & Kayael).

Kerjasama penting dalam hubungan Turki dan KRG lainnya adalah Perjanjian Penjualan Gas Turki-KRG yang ditandatangani pada November 2013. Dalam perjanjian ini, KRG akan memberikan Turki 4 bcm gas awal pada 2018 dan volume ini diperkirakan akan diperpanjang hingga 10 bcm sebelum 2020. Namun, dalam penerapannya harus memperhatikan profil produksi gas, konsumsi wilayah Kurdi dan peran pemerintah pusat untuk menentukan kelayakan dari ekspor semacam itu (Akyener & Kayael).

Kemudian kerjasama lanjutan antara KRG dan Turki yaitu kerjasama di bidang keamanan terutama yang menyangkut isu terorisme. Pada tanggal 17 November 2016, Perdana Menteri Nechirvan Barzani dan Perdana Menteri Turki Binali Yildirim mengadakan pertemuan di Ankara, Turki. Pertemuan antara kedua pemimpin tersebut membahas mengenai upaya kerjasama dalam mengatasi operasi tindakan terorisme. Mengatasi tindakan terorisme yang dimaksud yaitu mengatasi tindakan kelompok teroris manapun, baik itu operasi penanggulangan teror terhadap Daesh dan organisasi teroris PKK, serta kelompok teror lain yang mengancam stabilitas dan perdamaian di Irak (Aydogan, 2016).

Selain membicarakan masalah kerjasama keamanan, kedua pemimpin juga membahas masalah ekonomi dan politik KRG dan Turki. Sumber-sumber diplomatik Turki

mengatakan bahwa salah satu alasan utama kunjungan tersebut adalah untuk membahas kemungkinan didirikannya kantor perwakilan KRG di Ankara, yang akan dibangun pada tahun 2017. Seorang ahli dari Pusat Penelitian Strategi Timur Tengah (ORSAM) Bilgay Duman menuturkan bahwa pendirian kantor KRG bukan merupakan masalah baru, keputusan seperti itu akan memberikan Turki keuntungan dalam pengaruh terhadap masalah-masalah regional (Aydogan, 2016).

Kerjasama antara Amerika juga pernah dilakukan dengan Kurdi. Seperti pada tahun 2003, dalam rangka menggulingkan pemerintahan Saddam Hussein para pemimpin Kurdi mengambil keputusan krusial dengan membuka wilayah mereka sebagai pangkalan militer Amerika. Amerika dan Kurdi membangun aliansi dalam rangka menyerang Baghdad. Namun, Kurdi tidak diberikan kekuasaan yang besar oleh Amerika karena alasan menghindari konflik etnis di masa depan (Danisworo, Utomo, & Astuti, 2013).

Setelah pemerintahan Saddam Hussein tumbang. Secara tidak langsung Amerika menghadahi Kurdi dengan otonomi khusus. Status hukum otonomi KRG tertuang pada pasal 54, 55 dan 115 konstitusi Irak. Dalam konstitusi Irak juga mengatur otoritas Kurdistan yang berisi berbagai kekuasaan istimewa seperti memiliki pasukan sendiri, otoritas kewarganegaraan dan kebijakan luar negeri tanpa batas (Danisworo, Utomo, & Astuti, *Dinamika Gerakan Etnonasionalisme Kurdi Irak (Studi Kajian Periode 1979-2012)*, 2013).

Dengan demikian, dapat kita lihat bagaimana keseriusan Kurdistan Regional Government untuk mendapatkan pengakuan internasional. Keseriusan ini dilakukan dengan tujuan untuk mendirikan negara Kurdi yang berdaulat. Hal ini ditunjukkan melalui upaya diplomasi serta kerjasama yang sudah dijalin oleh KRG dengan Turki. Namun, karena alasan

kesatuan politik Irak yang juga merupakan unit strategis penting untuk politik luar negeri Turki. Maka dari itu Turki hanya menjadikan KRG sebagai mitra untuk bekerjasama. Sehingga, Turki belum memberikan pengakuan bagi KRG sebagai negara yang berdaulat tetapi hanya sebatas pengakuan *de facto* saja.

Pada 25 september 2017, Kurdistan Regional Government mengadakan referendum mengenai kemerdekaan otonomi Kurdi di Irak Utara. Keputusan untuk mengadakan referendum tersebut dimaksudkan untuk berpisah dari Irak dan mendirikan negara sendiri. Akan tetapi respon yang didapatkan dari dunia internasional khususnya negara-negara tetangga Kurdi, sangat menolak diadakannya referendum ini. Alasan penolakan dilakukannya referendum tersebut yaitu, referendum yang dilakukan KRG Irak akan mendorong suku Kurdi yang berada di wilayah negara lain (Turki, Suriah dan Iran) untuk menuntut hal yang sama dengan KRG Irak dan referendum tersebut dapat memicu gerakan separatisme dan mengancam keamanan nasional, yang dalam hal ini tidak hanya Irak tetapi Turki dan Iran juga. “Presiden Recep Tayyip Erdogan dan Perdana Menteri Irak Haidar al-Abadi menekankan pentingnya integritas teritorial Irak dan sepakat bahwa desakan mengadakan referendum akan meningkatkan ketegangan di wilayah tersebut” kata seorang sumber dari Kantor Kepresidenan Turki (Dikarma, 2017).